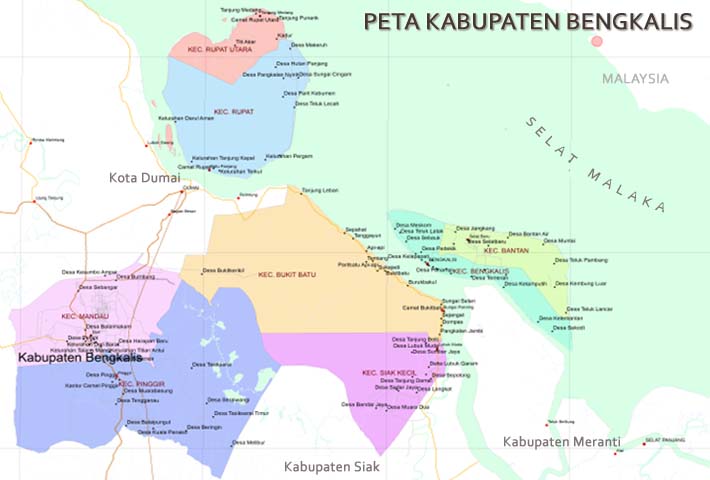
|  |
| --- |
| **LAPORAN**  **AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  **TAHUN 2018** |



**KABUPATEN BENGKALIS**

**TAHUN 2016**

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN**

**STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2019**

**Daftar isi**

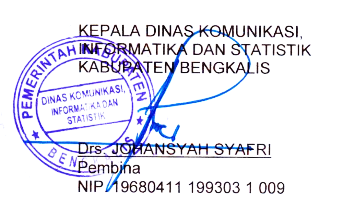
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Daftar Isi.……………………………………………………………………………….. | | | | 1 |
| Kata Pengantar………………………………………………………………………… | | | | 2 |
| Ringkasan Eksekutif…………………………………………………………………… | | | | 3 |
| Bab I | Pendahuluan….………………………………………………………………. | | | 4 |
|  | 1. Latar Belakang………………………………….……………………….. | | | 4 |
|  | 1. Maksud dan Tujuan……………………………………………………... | | | 4 |
|  | 1. Tugas dan Fungsi…..…………………………………………………… | | | 4 |
|  | 1. Struktur Organisasi……………………………………………………… | | | 5 |
| Bab II | Perencanaan dan Perjanjian Kinerja…..…………………………………... | | | 14 |
|  | A. Rencana Strategis Tahun 2016-2021…..…………………………….. | | | 14 |
|  | B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018…..…………………………………...... | | | 16 |
| Bab III | Akuntabilitas Kinerja………………………………………………………… | | | 18 |
|  | A. | Pengukuran Kinerja………………………………………..................... | 18 | | |
|  | B. | Analisis Kinerja.......…………………………………………………...... | 19 | | |
|  | C. | Realisasi Anggaran……………………………………………………... | 24 | | |
|  | D. | Analisis Efisiensi............................................................................... | 26 | | |
| Bab IV | Penutup…..…………………………………………………………………… | | | 27 |

**KATA PENGANTAR**

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahdan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2018.

Laporan Kinerja ini menyajikan analisis capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun 2018, tentunya masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, kami berharap Laporan Kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis pada tahun‐tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja dan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Bengkalis, 21 Januari 2019

**RINGKASAN EKSEKUTIF**

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis, sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis serta Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani Perjanjian Kinerja tahun 2018 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2018, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis terdapat 5 (lima) sasaran dan terdapat 8 (delapan) indikator untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2018.

Secara keseluruhan Sasaran dalam Perjanjian Kinerja tahun 2018 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis telah tercapai, yaitu dari 11 (sebelas) indikator kinerja sudah tercapai dan terpenuhi. Hanya pada sasaran 4 (empat) dari 5 (lima) sasaran kinerja terjadi penyerapan anggaran yang rendah yaitu 57,40% dengan kata lain terdapat efisiensi sebesar 42,60% hal ini dikarenakan dalam proses Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2018 terdapat 2 (dua) kegiatan yang pada awalnya telah direncanakan untuk dirasionalisasi karena keterbatasan anggaran namun setelah pengesahan P-APBD Tahun 2018 ternyata kegiatan tersebut masih tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sehingga untuk mencapai efektifitas realisasi fisik dan keuangan dengan sisa waktu pelaksanaan kegiatan yang ada kegiatan tersebut diupayakan untuk dilaksanakan.

Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 merupakan hasil kerjasama segenap jajaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis, serta bimbingan dari pimpinan dan PD dan *Stakeholder* terkait. Untuk tahun 2018, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja menuju prinsip *good governance dan clean governance.*

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Penyusunan Laporan Kinerja (LK) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah. Proses penyusunan LK dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis. LK menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LK tingkat Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah.

1. **Maksud dan Tujuan**

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2018. Adapun tujuannya adalah pertama, Laporan Kinerja merupakan tolok ukur kinerja yang telah dicapai pada tahun 2018 dan sarana bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder*. Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

1. **Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik memiliki kewenangan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar yang menjadi kewenangan daerah. Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika dibagi dalam Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik, dan Aplikasi Informatika. Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota adalah Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan 3 (tiga) layanan utama, 1) Penyediaan informasi publik Pemerintah Daerah, 2) Penyelenggaraan komunikasi publik Pemerintah Daerah, 3)Pengelolaan penyelesaian Sengketa Informasi di daerah. Sub Urusan Aplikasi Informatika yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota adalah 1) Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota. 2) Pengelolaan *e-government* di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Urusan Bidang Statistik terbagi kedalam Sub Urusan Statistik Sektoral dan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota adalah Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah kabupaten/kota. Untuk Urusan Bidang Persandian terbagi kedalam Sub Urusan Persandian untuk Pengamanan Informasi dan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota adalah 1) Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota. 2) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah kabupaten/kota.

Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota tersebut tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik diatur dengan Peraturan Bupati Bengkalis berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja, pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis. Tugas dan fungsi tersebut antara lain:

Perumusan, perencanaan kebijakan, teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan perizinan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

1. Pengawasan dan pengendalian teknis dibidang Komunikasi, Informatika dan Statistik sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
2. Pembinaan dan bimbingan terhadap Dinas lingkup Komunikasi dan Informatika, Komunikasi dan Informatika yang bersifat teknis dan fungsional berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat berdasarkan perturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
3. Pengelolaan Tata Usaha Dinas.
4. **Struktur Organisasi**

Untuk melaksanakan tugas pokok dibidang Komunikasi, Informatika dan Statsitik Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis didukung oleh unsur organisasi dengan struktur sebagai berikut:

1. Kepala mempunyai tugas:
2. Kepala mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang komunikasi, informatika dan statistik;
3. Kepala dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, menyelenggarakan fungsi:
4. Menyusun rencana, program, evaluasi dan pelaporan;
5. Melaksanakan administrasi kepegawaian dan rumah tangga Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
6. Melaksanakan administrasi keuangan dan perlengkapan serta penataan asset;
7. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi dan hubungan masyarakat;
8. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tigas bidang;
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
10. Sekretariat
11. Sekretaris mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian perencanaan, penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan perlengkapan.
12. Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud pada angka 1, menyelenggarakan fungsi:
13. Penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan;
14. Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan rumah tangga Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
15. Pelaksanaan administrasi keuangan dan perlengkapan serta penataan asset;
16. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi dan hubungan masyarakat;
17. Pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat;
18. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
19. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.
20. Sub Bagian Penyusunan Program

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang penyusunan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
3. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Umum dan Kepegawaian;
4. mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
5. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
6. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
7. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang Keuangan dan Perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Uraian Tugas tersebut pada angka 1, sebagai berikut:
9. merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
10. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
11. mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
12. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah
13. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
14. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian dibidang Pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang meliputi pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi, dan pelayanan informasi publik.
15. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, menyelenggarakan fungsi:
16. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di ruang lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah serta pelayanan informasi publik;
17. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di ruang lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah serta pelayanan informasi publik;
18. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di ruang lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah serta pelayanan informasi publik;
19. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis supervisi dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di ruang lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah serta pelayanan informasi publik;
20. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di ruang lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah serta pelayanan informasi publik; dan
21. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugasnya.
22. Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik

Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dibidang pengelolaan dan pelayanan informasi publik dalam menyiapkan bahan bimbingan, pedoman, kebijakan dan petunjuk teknis tentang pengelolaan opini dan aspirasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Seksi Pegelolaan Informasi

Seksi pengelolaan informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dibidang pengelolaan dan pelayanan informasi publik dalam menyiapkan bahan bimbingan, pedoman, kebijakan dan petunjuk teknis tentang pengelolaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Seksi Pelayanan Informasi Publik

Seksi Pelayanan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dibidang pengelolaan dan pelayanan informasi publik dalam menyiapkan bahan bimbingan, pedoman, kebijakan dan petunjuk teknis tentang Pelayanan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bidang Sumber Daya Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian dibidang sumber daya komunikasi dan informatika, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Bidang Sumber Daya Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka 1, menyelenggarakan fungsi:
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang penyediaan kontenitas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang penyediaan kontenitas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
4. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan dibidang penyediaan kontenitas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
5. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang penyediaan kontenitas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
6. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang penyediaan kontenitas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas komunikasi publik dan penyediaan akses informasi; dan
7. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
8. Seksi Penyedia Konten Lintas Sektoral dan Pengolahan Media Komunikasi Publik

Seksi Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengolahan Media Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sumber daya Komunikasi dan Informasi dalam menyiapkan bahan bimbingan, pedoman, kebijakan dan petunjuk teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Seksi Layanan Hubungan Media

Seksi Layanan Hubungan Media mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sumber Daya Komunikasi dan Informasi dalam menyiapkan bahan bimbingan, pedoman, kebijakan dan petunjuk teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Seksi Penguatan Kapasitas Sumberdaya Komunikasi Publik dan Penyediaan Akses Informasi

Seksi Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sumber daya komunikasi dan infromasi dalam menyiapkan bahan bimbingan, pedoman, kebijakan dan petunjuk teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

h. Bidang Pengelolaan Berbasis Elektronik

1. Bidang Pengelolaan Berbasis Elektronik mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan perumusan sistem informasi/telematika sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bidang Pengelolaan Berbasis Elektronik dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, menyelenggarakan fungsi:
3. penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan system informasi/aplikasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
4. pengelolaan system informasi/aplikasi/telematika dan pembangunan infrastrukturnya;
5. pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian system informasi/aplikasi/telematika dan teknologi; dan
6. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7. Seksi Aplikasi

Seksi Aplikasi melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Berbasis Elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. merencanakan kegiatan dan program Seksi Aplikasi sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
2. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan aplikasi;
3. melaksanakan koordinasi,kerjasama pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tentang aplikasi;
4. menyiapkan data informasi tentang aplikasi;
5. menyiapkan materi bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis aplikasi;
6. melaksanakan penggabungan system manajemen database,layanan web,replikasi dan federasi system;
7. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pemberian rekomendasi/pertimbangan teknis aplikasi;
8. membagi tugas,bimbingan,memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Seksi Aplikasi;
9. melakukan pemantauan,evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Aplikasi; dan
10. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya;
11. Seksi Telematika

Seksi Telematika mempunyai tugas melaksanakan tugas yang berhubungan dengan pengembangan dan pengendalian telematika secara aplikasi telematika sesuai dengan petunjuk teknis yang mengacu pada ketentuan yang berlaku.

1. merencanakan kegiatan dan program Seksi Telematika sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
2. melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan,norma,kriteria,dan bimbingan teknis serta evaluasi dibidang system informasi;
3. melaksanakan evaluasi bidang keamanan system informasi dan perangkat keras,perangkat lunak serta bidang konten;
4. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengembangan dibidang e-government, perangkat lunak dan konten,pemberdayaan telematika,standarisasi dan monitoring;
5. memberikan pelayanan dan bimbingan teknis,serta evaluasi dibidang infrastruktur aplikasi tatalaksana e-government, aplikasi layanan public dan pemerintahan;
6. melaksanakan kerjasama program e-government antar lembaga pemerintah dan/atau lembaga swasta;
7. melaksanakan pembangunan,pengelolaan dan pengembangan infrastruktur dan manajemen system informasi daerah;
8. membagi tugas,membimbing,memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Seksi Telematika;
9. melakukan pemantauan,evaluasi dan membat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Telematika; dan
10. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya;
11. Seksi Infrastruktur dan Teknologi

Seksi Infrastruktur dan teknologi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Berbasis Elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. merencanakan kegiatan dan program Seksi Infrastruktur dan Teknolgi sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
2. menyiapkan bahan kebijakan,bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengelolaan perangkat keras infrastruktur jaringan teknologi informasi serta Sarana dan Prasarana;
3. menyiapakan data informasi perangkat keras infrastruktur jaringan teknologi informasi serta Sarana dan Prasarana;
4. menyiapkan materi bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis pengelolaan perangkat infrastruktur jaringan teknologi informasi serta sarana dan prasarana;
5. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pemberian rekomendasi/pertimbangan teknis pengadaan komputer,pengembangan infrastruktur jaringan teknologi informasi serta sarana dan prasarana;
6. melaksanakan pembangunan dan pengembangan perangkat keras infrastruktur jaringan teknologi informasi serta sarana dan prasarana;
7. melaksanakan penyusunan rencana induk pengembangan teknologi informasi daerah;
8. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan perangkat keras infrastruktur jaringan teknologi informasi serta sarana dan prasarana;
9. membagi tugas,membimbng,memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Infrastruktur dan Teknologi; dan
10. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya;
11. Bidang Statistik dan Persandian
12. Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13. Bidang Statistik dan Persandian dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, menyelenggarakan fungsi:
14. perumusan kebijakan keamanan informasi;
15. pelaksanaan inventarisasi kebutuhan kebijakan keamanan informasi;
16. pelaksanaan koordinasi kegiatan jabatan fungsional Sandiman;
17. perumusan peraturan teknis pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaringan komunikasi sandi;
18. pengelolaan sumber daya manusia sandi;
19. pengelolaan perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaringan komunikasi sandi;
20. pelaksaan koordinasi kegiatan jabatan fungsional sandiman; dan
21. pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.
22. Seksi Statistik

Seksi Statistik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Statistik dan Persandian dan melaksanakan survey dibidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM yang mendapatkan rekomendasi BPS dalam menyiapkan bahan bimbingan, pedoman, kebijakan dn petunjuk teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan survey dibidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM yang mendapatkan rekomendasi BPS;
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan survey dibidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM yang mendapatkan rekomendasi BPS;
3. Menyiapkan bahan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan survey dibidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM yang mendapatkan rekomendasi BPS;
4. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis supervise survey dibidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM yang mendapatkan rekomendasi BPS;
5. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan survey dibidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM yang mendapatkan rekomendasi BPS; dan
6. Seksi Persandian

Seksi Persandian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Statistik dan Persandian dalam menyiapkan bahan bimbingan, pedoman, kebijakan dan petunjuk teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

* 1. menyusunan peraturan teknis pengelolaan informasi berklasifikasi milik pemerintah daerah;
  2. melakukan klasifikasi informasi milik pemerintah daerah;
  3. melakukan pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
  4. melaksanakan pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
  5. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;.

1. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Persandian

Seksi Pengawasan dan Evaluasi Persandian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola persandian, sumberdaya persandian dan operasional Pengamanan Persandian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis

1. melaksanakan penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola persandian dan pengelolaan sumberdaya persandian;
2. melaksanakan penyiapan instrument pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan dan pengamanan komunikasi sandi;
3. melaksanakan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan dan pengamanan komunikasi sandi di seluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. menyiapkan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
5. menyiapkan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;.
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik belum memiliki UPT.

1. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik belum memiliki pejabat fungsional.

**BAB II**

**PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 dan menjawab Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun 2018.

1. Rencana Strategis Tahun 2016 -2021

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sasaran | Indikator | Target | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Meningkatnya infrastruktur jaringan komunikasi dan informatika | Cakupan OPD yang terkoneksi dan terintegrasi jaringan komunikasi dan informatika | 20 Perangkat Daerah | 35 Perangkat Daerah | 35 Perangkat Daerah | 35 Perangkat Daerah | 35 Perangkat Daerah |
|  | Cakupan titik Wi-Fi yang terpelihara | 10 titik | 10 titik | 10 titik | 10 titik | 10 titik |
|  | Jumlah edisi Buletin informasi Pemerintah Daerah yang di publikasi | 4 edisi | 4 edisi | 4 edisi | 4 edisi | 4 edisi |
| Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Cakupan aplikasi/sistem informasi yang dikembangkan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cakupan sertifikasi layanan LPSE yang dicapai | 1 | 5 | - | - | - |
| Cakupan penyediaan bandwidth dalam setahun | 50 MB | 100 MB | 200 MB | 250 MB | 250 MB |
| Cakupan permintaan informasi yang ditindaklanjuti | 50% | 65% | 75% | 85% | 95% |
| Meningkatnya akses permintaan informasi dan dokumentasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | Cakupan peningkatan permintaan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID | 65% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Meningkatnya diseminasi dan distribusi informasi pemerintah | Cakupan peningkatan peserta sosialisasi | 100 orang | 100 orang | 100 orang | 100 orang | 100 orang |
| Meningkatnya penyebarluasan informasi pembangunan daerah, informasi potensi dan promosi daerah melalui kerjasama/kemitraan dengan Mass Media | Cakupan media massa yang melakukan kerjasama sesuai dengan peraturan | 70 media | 70 media | 70 media | 70 media | 70 media |
|  | Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) | 0 | 3 kecamatan | 11 kecamatan | 11 kecamatan | 11 kecamatan |
|  | Cakupan kecamatan untuk penyebarluasan informasi melalui media luar ruang | 8 kecamatan | 11 kecamatan | 11 kecamatan | 11 kecamatan | 11 kecamatan |

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sasaran | Indikator | Target |
| Meningkatnya infrastruktur jaringan komunikasi dan informatika | Cakupan OPD yang terkoneksi dan terintegrasi jaringan komunikasi dan informatika | 35 Perangkat Daerah |
|  | Cakupan titik Wi-Fi yang terpelihara | 10 titik |
|  | Cakupan jumlah edisi buletin Pemerintah Daerah yang dipublikasi/terbitkan | 3 edisi |
| Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Cakupan aplikasi/sisitem informasi yang dikembangkan | 1 |
|  | Cakupan sertifikasi pelayanan LPSE yang dicapai | 5 sertifikat |
|  | Cakupan penyediaan bandwidth dalam setahun | 100MB |
|  | Cakupan permintaan informasi yang ditindaklanjuti | 65% |
| Meningkatnya akses permintaan informasi dan dokumentasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | Cakupan peningkatan permintaan/layanan informasi yang ditindaklanjuti PPID | 100% |
| Meningkatnya diseminasi dan distirbusi informasi pemerintah | Cakupan peserta yang mengikuti sosialisasi | 100 orang |
| Meningkatnya penyebarluasan informasi pembangunan daerah, informasi potensi dan promosi daerah melalui kerjasama/kemitraan dengan Mass Media | Cakupan media massa yang melakukan kerjasama penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah | 70 media |
|  | Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) | 3 KIM |
|  | Cakupan kecamatan untuk penyebarluasan informasi melalui media luar ruang | 11 kecamatan |

**BAB III**

**AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis merupakan bentuk pertanggung-jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2018. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

1. **Pengukuran Kinerja**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sasaran** | **Indikator** | **Target** | **Realisasi** | **Capaian** |
| Meningkatnya infrastruktur jaringan komunikasi dan informatika | Cakupan OPD yang terkoneksi dan terintegrasi jaringan komunikasi dan informatika | 35 Perangkat Daerah | 23 Perangkat Daerah | 66% |
|  | Cakupan titik Wi-Fi yang terpelihara | 10 titik | 10 titik | 100% |
|  | Cakupan edisi buletin Pemerintah Daerah yang diterbitkan | 3 edisi | 1 edisi | 33,33% |
| Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public | Cakupan aplikasi/sistem informasi yang dikembangkan | 1 | 2 | 200% |
|  | Cakupan sertifikasi pelayanan LPSE | 5 sertifikat | 8 sertifikat | 117% |
|  | Cakupan penyediaan bandwidth dalam setahun | 100 MB | 100 MB | 100% |
|  | Cakupan permintaan informasi yang ditindaklanjuti | 65% | 100% | 153% |
| Meningkatnya akses permintaan informasi dan dokumentasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | Cakupan peningkatan permintaan/layanan informasi yang ditindaklanjuti PPID | 100% | 100% | 100% |
| Meningkatnya diseminasi dan distirbusi informasi pemerintah | Cakupan peserta yang mengikuti sosialisasi | 100 orang | 120 orang | 120% |
| Meningkatnya penyebarluasan informasi pembangunan daerah, informasi potensi dan promosi daerah melalui kerjasama/kemitraan dengan Mass Media | Cakupan media massa yang melakukan kerjasama penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah | 70 media | 70 media | 100% |
|  | Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) | 3 kecamatan/ KIM | 8 kecamatan | 266% |
|  | Cakupan kecamatan untuk penyebarluasan informasi melalui media luar ruang | 11 kecamatan | 11 kecamatan | 100% |

1. **Analisis Kinerja**

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari 6 (enam) sasaran dan 13 (tiga belas) indikator tersebut seluruhnya dinyatakan “berhasil” yaitu capaiannya rata-rata ≥ 89,71% dari target.

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut:

Sasaran 1

Meningkatnya infrastruktur jaringan komunikasi dan informatika

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator | 2017 | 2018 | | | Capaian 2018 thdp 2021 |
| Capaian | Target | Realisasi | Capaian |  |
| Cakupan OPD yang terkoneksi dan terintegrasi jaringan komunikasi dan informatika | - | 20 Perangkat Daerah | 20 Perangkat Daerah | 100% | 57% |
| Cakupan titik Wi-Fi yang terpelihara | 100% | 10 titik | 10 titik | 100% | 40% |
| Cakupan jumlah edisi buletin inormasi Pemerintah Daerah yang dipublikasi | 100% | 3 item | 3 item | 100% | 40% |
|  |  |  |  |  |  |
| Rata-rata Capaian | | | | 100% | 45,6% |

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Bengkalis terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 dimana Diskominfotik berasal dari urusan komunikasi informasi di Dinas Perhubungan dan Kominfo, urusan komunikasi (publikasi media) di Bagian Humas dan Sub Urusan Informatika di Bagian Pengelolaan Data Elektronik Sekretariat Daerah Bengkalis. Berkenaan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengatur kewenangan urusan disampaikan bahwa terkait dengan berlakunya PP 18 tahun 2016 ini dan berkenaan dengan baru dibentuknya Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis pada tahapan perencanaan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2018 diskominfotik tidak memiliki Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja (Renja)) sementara pemahaman dan pengetahuan terkait kewenangan urusan, sub urusan, program dan kegiatan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian belum begitu dipahami.

Di sisi lain dengan lemahnya kerjasama pada tahapan perencanaan RKA 2018 semakin membuat rendahnya sinkronisasi target dan sasaran antara program, kegiatan dan capaian kinerja. Keadaan ini menjadi semakin rumit ketika disandingkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena terdapat program yang tidak tertampung di RPJMD dan plafon pendanaan pagu program RPJMD yang membatasi sehingga semakin mempersempit ruang gerak didalam penyusunan Renstra, Renja dan RKPD yang sesungguhnya.

**Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan**

Adapun faktor yang mempengaruhi capaian kinerja Sasaran 1 adalah:

* + - 1. Komitmen Pimpinan
      2. Dukungan regulasi, Pengalaman kerja dan Pendanaan

**Permasalahan/Hambatan**

Pencapaian indikator pada Sasaran 1 sampai dengan tahun 2018 telah berjalan dan dicapai dengan baik, tidak terdapat permasalahan /hambatan yang berarti meskipun pada Perubahan APBD Tahun 2018 terdapat target yang dikurangi dikarenakan kondisi keuangan yang kurang mendukung.

**Solusi/Strategi Pemecahan masalah**

Sasaran 2

Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator | 2017 | 2018 | | | Capaian 2018 thdp 2021 |
| Capaian | Target | Realisasi | Capaian |  |
| Cakupan aplikasi/sistem informasi yang dikembangkan | 100% | 2 | 2 | 100% | 40% |
| Cakupan sertifikasi pelayanan LPSE | 100% | 5 sertifikat | 5 sertifikat | 100% | 40% |
| Cakupan penyediaan bandwidth dalam setahun | 100% | 100 MB | 100 MB | 100% | 40% |
| Cakupan permintaan informasi yang ditindaklanjuti PPID | 100% | 100% | 100% | 100% | 40,00% |
| Rata-rata Capaian | | | | 100% | 32% |

Target capaian indikator pada Sasaran 2 ini baik. Pada tahun 2017 target dan capaian aplikasi/sistem informasi yang dikembangkan adalah 1 aplikasi dicapai 100%, kemudian target dan capaian penyediaan bandwidth tahun 2017 adalah 50 MB dicapai 100% dan tahun 2018 adalah 100 MB dicapai 100%. Target pada akhir perencanaan yaitu tahun 2021 adalah 850 MB.

**Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan**

Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat capaian indikator pada Sasaran 2 ini adalah:

Komitmen pimpinan

Aparatur yang berpengalaman

Tersedianya sarana dan prasarana LPSE dan PPID yang mendukung, yang mana pada akhir tahun 2018 LPSE berada pada naungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, dan terpisah dari Dinas Komunkasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis

Kerjasama yang baik dengan Badan Publik berkenaan dengan pengelolaan dan pelayanan permintaan informasi PPID.

**Permasalahan/Hambatan**

Berkenaan dengan 17 standard/sertifikasi pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang harus dipenuhi sampai pada tahun 2018 dicapai 6 sertifikat.

**Solusi/Strategi Pemecahan masalah**

Untuk meningkatkan pengalaman dan kreatifitas aparatur didalam pengelolaan LPSE dan PPID kiranya perlu mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis, peningkatan kualitas prosedur, administrasi dan sarana prasarana LPSE.

Sasaran 3

Meningkatnya akses permintaan informasi dan dokumentasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator | 2017 | 2018 | | | Capaian 2018 thdp 2021 |
| Capaian | Target | Realisasi | Capaian |  |
| Cakupan peningkatan permintaan/layanan informasi yang ditindaklanjuti PPID | 100% | 100% | 100% | 100% | 40% |
| Rata-rata Capaian | | | | 100% | 40% |

Capaian indikator pada Sasaran 3 adalah 100% yaitu target yang ditetapkan 100% dan realisasi adalah 100%.

**Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan**

Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat capaian indikator pada Sasaran 2 ini adalah:

Komitmen pimpinan

Adanya regulasi yang baik

Adanya dukungan anggaran

Aparatur, prosedur dan sarana prasarana yang mendukung.

**Permasalahan/Hambatan**

Tidak ditemukan permasalahan yang berarti didalam kegiatan ini karena adanya regulasi yang baik yang mengatur kerjasama media massa didalam menyebarluaskan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sasaran 4

Meningkatnya diseminasi dan distribusi informasi pemerintah

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator | 2017 | 2018 | | | Capaian 2018 thdp 2021 |
| Capaian | Target | Realisasi | Capaian |  |
| Cakupan peningkatan pemahaman peserta sosialisasi | - | 100 orang | 100 orang | 100% | 100% |
| Rata-rata Capaian | | | | 100% | 100% |

Capaian indikator pada Sasaran 4 adalah 100% yaitu target yang ditetapkan 100 orang dan realisasi adalah 100 orang yang mengikuti sosialisasi diseminasi dan distibusi informasi.

Sasaran 5

Meningkatnya penyebarluasan informasi pembangunan daerah, informasi potensi dan promosi daerah melalui kerjasama/kemitraan dengan media massa.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator | 2017 | 2018 | | | Capaian 2018 thdp 2021 |
| Capaian | Target | Realisasi | Capaian |  |
| Cakupan media massa yang melakukan kerjasama sesuai dengan peraturan | 100% | 70 media | 70 media | 100% | 40% |
| Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) | - | 3 kecamatan/ KIM | 8 kecamatan/ KIM | 266% | 53% |
| Rata-rata Capaian | | | | 183% | 46,5% |

Capaian indikator Sasaran 5 pada cakupan media massa yang melakukan kerjasama sesuai dengan peraturan terlihat bahwa target tahun 2017 dan 2018 140 media dengan capaian 100%. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM target tahun 2018 adalah 3 kecamatan/KIM dengan capaian 8 kecamatan/KIM.

**Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan**

Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat capaian indikator pada Sasaran 2 ini adalah:

Komitmen pimpinan

Adanya regulasi yang baik

Adanya dukungan aparatur dan anggaran.

Partisipasi pihak kecamatan dan masyarakat

**Permasalahan/Hambatan**

Tidak ditemukan permasalahan yang berarti didalam kegiatan ini, hanya disarankan untuk memperkuat kelembagaan, dan pengetahuan anggota KIM yang telah dibentuk dengan mengadakan kegiatan Sosialisasi untuk KIM.

1. **Realisasi Anggaran**

Realisasi anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 adalah sebesar Rp12.523.461.132,- atau 89,13% dari pagu sebesar Rp14.061.504.184,- Adapun penyerapan anggaran terbesar terdapat pada sasaran 3 yaitu sebesar Rp2.744.836.022,- Sementara, penyerapan anggaran yang terkecil pada sasaran 1 yaitu Meningkatnya penyebarluasan informasi pembangunan daerah, informasi potensi dan promosi daerah melalui kerjasama/kemitraan dengan Mass Media. Rincian capaian kinerja dan anggaran ditahun 2018 sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Belanja Tidak Langsung | Rata-rata Capaian | Anggaran | | |
| Target | Realisasi | % |
| Belanja gaji dan tunjangan pegawai | 100% | 2.456.834.884,- | 2.208.373.603,- | 89,89% |
| Tambahan Penghasilan Pegawai | 100% | 1.991.115.000,- | 1.880.801.430,- | 94,46% |
|  |  |  |  |  |
| Total | | 4.447.949.884,- | 4.089.175.033,- | 91,93% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sasaran | Rata-rata Capaian | Anggaran | | |
| Target | Realisasi | % |
| Meningkatnya infrastruktur jaringan komunikasi dan informatika | 100% | 1.516.686.000,- | 1.429.978.000,- | 94,28% |
| Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | 100% | 2.848.647.000,- | 2.387.629.022,- | 83,82% |
| Meningkatnya akses permintaan informasi dan dokumentasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | 100% | 181.240.000,- | 152.755.000,- | 84,28% |
| Meningkatnya diseminasi dan distribusi informasi pemerintah | 100% | 260.217.800,- | 149.390.814,- | 57,40% |
| Meningkatnya penyebarluasan informasi pembangunan daerah, informasi potensi dan promosi daerah melalui kerjasama/kemitraan dengan Mass Media | 183% | 2.493.610.800,- | 2.302.432.280,- | 92,33% |
| Total | | 7.040.183.800,- | 6.272.794.302,- | 89% |

1. **Analisis Efisiensi**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Sasaran | Capaian Kinerja | Realisasi  Anggaran | Tingkat Efisiensi |
| 1. | Meningkatnya infrastruktur jaringan komunikasi dan informatika | 100% | 94,28% | 5,72% |
| 2. | Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | 100% | 83,82% | 16,18% |
| 3. | Meningkatnya akses permintaan informasi dan dokumentasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | 100% | 84,28% | 15,72% |
| 4. | Meningkatnya diseminasi dan distribusi informasi pemerintah | 100% | 57,40% | 42,60% |
| 5. | Meningkatnya penyebarluasan informasi pembangunan daerah, informasi potensi dan promosi daerah melalui kerjasama/kemitraan dengan Mass Media | 183% | 92,33% | 7,67% |

**PENUTUP**

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2018 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis telah dicapai, yaitu 11 (sebelas) indikator kinerja sudah mendekati tercapai dan terpenuhi. Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator dan kinerja di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan, kerja keras dan keuletan aparatur, serta dukungan anggaran dan regulasi yang baik. Tentunya pada tahun 2019, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good* dan *clean governance.* Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2019 antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi yang baik di internal Perangkat Daerah baik antara tahapan perencanaan pelaksanaan kegiatan terhadap pengelolaan keuangan untuk menentukan efektifitas dan prioritas penggunaan anggaran;
2. Melakukan koordinasi yang baik antara Pimpinan Perangkat Daerah, Kepala Bidang dan seluruh aparatur terkait perencanaan pelaksanaan program/kegiatan, sasaran target dan kinerja kegiatan;
3. Melakukan koordinasi yang baik dengan Perangkat Daerah terkait seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bengkalis serta Inspektorat Bengkalis
4. Melakukan rapat internal secara rutin berkenaan dengan evaluasi sasaran target dan kinerja kegiatan.